

Hambatan *Trans-Tasman Bubble (Safe Travel Zone)* Australia dan Selandia Baru Tahun 2020

Hazella Widya Anggraini¹

Abstract: *The Trans-Tasman Bubble is an agreement between Australia and New Zealand in an effort to encourage international travel, particularly at the Trans-Tasman border. As a result of the Covid-19 pandemic that has hit the world, many countries have implemented lockdowns, instead have had an impact on the decline in state sectors. This research aims to analyze and describe the obstacle factors in the implementation of the Trans-Tasman Bubble. The research method used is descriptive with secondary data types. The analysis technique is qualitative. The concepts used are international cooperation.*

Keywords: *Trans-Tasman Bubble, Australia, New Zealand, Travel*

Pendahuluan

Pandemi *Covid-19* menjadi wabah global yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019. Wabah ini memberikan dampak besar bagi penurunan perekonomian seluruh negara di dunia. Salah satu sektor terdampak besar ialah sektor pariwisata dan industri penerbangan dunia. Berdasarkan data *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)*, pendapatan pariwisata global menurun hingga 65% dan kehilangan sebanyak US\$ 460 miliar pada paruh pertama tahun 2020. Sementara Industri penerbangan global turut mengalami kerugian hingga US\$ 201 miliar, dimana nilai kerugian tersebut melampaui 9 tahun pendapatan kolektif industri maskapai global ([UNWTO, 2020](#)).

Penurunan pendapatan pada beberapa sektor negara khususnya pariwisata dan penerbangan dipengaruhi oleh adanya kebijakan pembatasan atau yang disebut sebagai kebijakan *lockdown* oleh pemerintah sebagai upaya meminimalisir peningkatan kasus *Covid-19* di negara mereka. Australia dan Selandia Baru pada 20 Maret 2020 mengumumkan bahwa negara mereka turut memberlakukan kebijakan penutupan yang terdiri dari penutupan perbatasan/*close border* dikedua negara (*Trans Tasman Border*), pembatasan perjalanan lintas negara baik masuk ataupun keluar, hingga pembatasan aktivitas baik itu sekolah, kerja, maupun aktifitas diluar lainnya ([Chen, 2020](#)).

Munculnya sebuah gagasan dari Selandia Baru pada Mei 2020 yang membahas mengenai sebuah strategi yang disebut *travel bubble*. Strategi tersebut bertujuan untuk dapat membuka kembali perjalanan *Trans-Tasman* selama pandemi *Covid-19* bersama Australia. Mengingat tingginya permintaan warga kedua negara kepada pemerintah untuk segera membuka perbatasan, agar dapat memulai kembali aktifitas yang biasa dilakukan di wilayah perbatasan sekaligus memulihkan ekonomi yang cukup terhambat akibat adanya kebijakan pembatasan sebelumnya. *Travel Bubble* dimaknai sebagai sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang telah berhasil mengontrol penyebaran virus *Covid-19* dan sepakat untuk membuka jalur perjalanan bebas karantina yang aman bagi negara yang bersepakat. Pasca pengumuman terkait gagasan *travel bubble* tersebut, banyak negara-negara yang mulai turut mengadopsinya seperti negara-negara Baltic dengan *Baltic Bubble*nya, Jepang dengan beberapa negara ASEAN, Singapura beserta beberapa negara lainnya ([Muhammad dan Saputra, 2020: 12](#)).

Berangkat dari pengenalan strategi *travel bubble*, pada Mei 2020 Australia dan Selandia Baru turut mengumumkan bahwa mereka akan segera membentuk kesepakatan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : hazella.wdy@gmail.com.

travel bubble bersama untuk membuka perbatasan *Trans-Tasman*, dan memulihkan industri pariwisata serta bisnis dan perdagangan di kedua negara. Kesepakatan tersebut diberi nama *Trans-Tasman Bubble (Safe Travel Zone)* ([The Guardian.com, 2020](#)).

Trans-Tasman Bubble (Safe Travel Zone) tahap awal diumumkan oleh perdana menteri kedua negara akan dilaksanakan uji coba penerbangan pertama pada 16 Oktober 2020. Uji coba penerbangan ini hanya dilakukan satu kali dengan penerbangan satu arah (*one way*) tidak sebaliknya, dimana keberangkatan dimulai dari kota Auckland, Selandia Baru menuju Sydney, Australia. Namun, setelah uji coba penerbangan pertama berhasil dilakukan, sayangnya *Trans-Tasman Bubble* tidak dapat dilanjutkan karena kondisi yang tidak memungkinkan bagi kedua negara. Sehingga pada akhirnya dibuat keputusan berdasarkan keputusan CAB-20-MIN-0532 bahwa *Trans-Tasman* akan dilanjutkan pada tahun 2021 ([Covid19.govt.nz, 2020: 1-3](#)).

Serangkaian diskusi dilakukan oleh pemerintah kedua negara, dalam hal ini yaitu untuk menentukan waktu yang tepat kapan *Trans-Tasman Bubble* sebaiknya harus dibuka. Hingga munculnya sebuah petisi dari partai oposisi Selandia Baru yang turut mendesak pemerintah agar segera membuka perbatasan *Trans-Tasman*. Akhirnya pemerintah kedua negara telah menyepakati tahap kedua *Trans-Tasman Bubble* dibuka pada 19 April 2021. Namun, pembukaan *Trans-Tasman Bubble* ini hanya berjalan selama dua bulan saja, karena pada 23 Juni 2021, melalui perdana menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan bahwa untuk kedua kalinya *Trans-Tasman Bubble* harus kembali ditangguhkan sampai waktu yang tidak ditentukan ([Forst, 2021](#)).

Hal ini menunjukkan bahwa *Trans-Tasman Bubble* telah mengalami penundaan sebanyak dua kali dikarenakan adanya beberapa hambatan yang mempengaruhi proses pelaksanaannya, oleh karena itu penulis meneliti apa yang menjadi hambatan pada penerapan *Trans-Tasman Bubble* Australia dan Selandia Baru.

Kerangka Teori

Konsep Kerjasama Internasional

Konsep kerjasama internasional menggambarkan bahwa setiap negara tidak dapat berdiri sendiri dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan adanya perbedaan kebutuhan masing-masing negara. Sedangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki tiap negara juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhan yang dimiliki negara lainnya.

Kerjasama internasional juga menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar dapat berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga menumbuhkan rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya yang menjalin kerjasama. Demikian halnya, negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya ialah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling menghormati, percaya, dan juga menghargai agar terbentuk kerjasama yang harmonis antar aktor-aktor internasional.

Menurut William D. Coplin, kerjasama internasional merupakan sebuah pola kerjasama yang awal mulanya terbentuk karena adanya satu alasan yaitu ketika kondisi ketika aktor-aktor internasional ingin melakukan interaksi secara rutin yang baru serta baik untuk mencapai tujuan bersama-sama ([Coplin, 1971: 289](#)).

Anak Agung perwita dan Yanyan Mochamad Yani, mengemukakan pendapatnya mengenai konsep kerjasama internasional yaitu, terjadinya hubungan internasional menjadi suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan antar negara. Selain itu karena akibat dari bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional,

sehingga saling ketergantungan (interdependensi) tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita dan Yadi, 2005: 4).

K.J. Holsti dalam buku terjemahannya yang berjudul 'Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis' juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa definisi terkait kerjasama internasional, yaitu (Holsti, 1988: 652-653):

- a. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- b. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- c. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- d. Persetujuan atas masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional ialah untuk memenuhi *national interest* yang belum terpenuhi maupun tidak dimiliki di dalam negerinya. Oleh sebab itu, negara tersebut perlu memperjuangkan *national interest* di luar negeri. Dalam hal ini, diperlukan adanya kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara. Selain itu, perlu keharusan untuk saling menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Dengan saling menghargai kepentingan masing-masing kerjasama dapat tercapai seperti yang diharapkan semula. Keputusan bersama dalam mengatasi persoalan yang timbul. Agar dapat tercapai keputusan bersama, maka diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan, dimana frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi daripada komitmen (Dam dan Riswandi, 1995: 15-16).

Penulis menggunakan konsep kerjasama internasional untuk menggambarkan bagaimana Australia dan Selandia Baru saling membutuhkan satu sama lain, khususnya dalam hal kerjasama dalam peningkatan serta perbaikan ekonomi di masa pandemi *Covid-19*, mengingat keduanya memiliki kedekatan geografis serta perjalanan *cross-border* warganya sangatlah tinggi di kedua negara, dalam hal ini bepergian untuk bekerja, berdagang, berwisata, dan lainnya. Untuk itu, kerjasama *Trans-Tasman bubble* dibentuk untuk mencapai kepentingan bersama antara kedua negara tersebut.

Terdapat beberapa syarat dalam terjadinya sebuah kerjasama internasional, yaitu adanya masalah dan kepentingan bersama antar aktor-aktor internasional, kemudian adanya tujuan bersama, usaha dan akhirnya membentuk kelompok kerjasama sebagai wadah kegiatannya, baik yang bersifat bilateral, regional, multilateral, internasional maupun global. Setelah kesepakatan tersebut terrealisasi antara negara-negara tersebut dalam kerangka kerja dan struktur yang berjalan, maka selanjutnya ialah kemampuan untuk meraih keberhasilan dalam pola kerjasama internasional itu (Herbert, 1996: 228).

Pelaksanaan pada kerjasama internasional permasalahannya ialah tidak hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama serta metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila terdapat manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuan daripada kerjasama internasional untuk meningkatkan kesejahteraan umum bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat meningkatkan kesejahteraan dan menyelesaikan masalah diantara dua atau lebih negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut (Zulkifli, 2012: 20-21).

Kerjasama internasional dalam pelaksanaannya sering kali terhambat oleh beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut dianggap mampu mempengaruhi

kerjasama dan dapat mengganggu rancangan kesepakatan ataupun kerjasama yang sedang diolah, akibatnya kerjasama tidak akan berjalan dengan baik. Draft *Modernisation Committee of UNECE* yang membahas tentang Hambatan dalam Kerjasama Internasional, menjelaskan bahwa faktor internal dan eksternal termasuk dalam daftar salah satu faktor yang mampu menghambat jalannya sebuah kerjasama internasional.

Modernisation Committee of UNECE mengemukakan adanya kemungkinan hambatan dalam kerjasama yang dikelompokkan dalam beberapa kategori penyebab, yaitu (*Modernisation Committee, 2016*):

- a. Kurangnya koordinasi antar internal pemerintah (juga termasuk: komunikasi internal, beban organisasi pimpinan, hambatan internal dan eksternal)
- b. Keterlibatan pemangku kepentingan (juga termasuk: Mandat (visi))
- c. Sumber daya manusia dan keuangan (juga termasuk: Pemilihan orang yang terlibat dalam kerjasama internasional)
- d. Kurangnya koordinasi antar pelaku kerjasama (termasuk juga: komunikasi eksternal)
- e. Hukum

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan hambatan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternalnya. Dimana faktor internal dan eksternal menjadi salah satu komponen utama pendukung kerjasama, dalam proses pembentukan regulasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah tentunya perlu disesuaikan oleh kondisi lingkungan diantara negara yang bersepakat baik secara internal maupun eksternal, namun ketika komponen utama tersebut tidak berjalan dengan baik ataupun tidak mampu mendukung jalannya kesepakatan maka akan menjadi penghambat dan memberikan dampak dalam pelaksanaan sebuah kerjasama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu menggambarkan hambatan pada *Trans-Tasman Bubble (Safe Travel Zone)* Australia dan Selandia Baru tahun 2020. Jenis data yang dimuat dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan teknik pengumpulan menggunakan telaah pustaka (*library research*) yang bersumber dari berbagai referensi buku, *e-book*, jurnal hingga internet.

Hasil dan Pembahasan

Penutupan perjalanan internasional merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir peningkatan kasus *Covid-19* yang melanda dunia. Banyak negara turut memberlakukan kebijakan penutupan perjalanan ini tanpa terkecuali Australia dan Selandia Baru. Kedua negara menetapkan kebijakan penutupan pada 20 Maret 2020. Namun, diberlakukannya kebijakan ini memang mampu mengurangi indikasi penyebaran pandemi, tetapi tak luput dari adanya dampak yang terjadi di kedua negara. Pendapatan perekonomian mulai menurun dikarenakan lumpuhnya sektor perjalanan seperti penerbangan serta tutupnya tempat-tempat wisata sehingga devisa dari kedatangan wisatawan pun menurun. Selain itu, sektor bisnis dan perdagangan di kedua negara yang biasa melalui jalur perbatasan *Trans-Tasman* pun turut terhambat karena adanya kebijakan tersebut.

Sehingga pada akhirnya menuntut Australia dan Selandia Baru untuk bersama-sama membangun sebuah kesepakatan agar dapat membuka perjalanan kembali di perbatasan *Trans-Tasman*, yang disebut *Trans-Tasman Bubble*.

Menyesuaikan dengan konsep kerjasama internasional, dapat terlihat bahwa hubungan kerjasama antara Australia dan Selandia Baru didasari atas adanya kepentingan dan kebutuhan bersama. Kebutuhan satu sama lain khususnya dalam pemulihan perekonomian pada sektor bisnis dan perdagangan, pariwisata serta industri penerbangan yang terdampak *Covid-19* mendesak kedua negara untuk segera membuat kesepakatan

bersama untuk membuka kembali perjalanan internasional khususnya wilayah perbatasan *Trans-Tasman* Australia dan Selandia Baru.

Namun, dalam pelaksanaannya kesepakatan *Trans-Tasman Bubble* Australia dan Selandia Baru mengalami penangguhan sebanyak dua kali karena adanya pengaruh dari hambatan faktor internal dan eksternal di kedua negara. Adapun pemaparan terkait faktor internal dan eksternal baik di Selandia Baru maupun Australia yang mempengaruhi terjadinya hambatan pada kesepakatan ialah sebagai berikut:

Hambatan Penerapan *Trans-Tasman Bubble*

A. Faktor Internal

1. Selandia Baru

Faktor internal yang menjadi penghambat kesepakatan dari sisi Selandia Baru yaitu adanya permasalahan pada sistem *Managed Isolation and Quarentine* (MIQ), belum meratanya program vaksinasi, hingga peluncuran petisi oleh pihak partai oposisi pemerintah Selandia Baru untuk mendesak pemerintah, berikut adalah penjelasannya:

a. *Managed Isolation and Quarentine*

Sesuai dengan yang tertuang dalam draft kabinet Selandia Baru tentang *Trans Tasman COVID Safe Travel Zone CAB-20-MIN-0532* nomor 6 yang menjelaskan bahwa menteri kesehatan Selandia Baru akan menyediakan fasilitas untuk isolasi dan karantina sebagai perbaikan sistem pasca penangguhan pada kesepakatan *Trans-Tasman Bubble* 16 Oktober 2020. Sehingga pada Januari 2021, pemerintah Selandia Baru mulai mengoperasikan fasilitas isolasi dan karantina yang dinamakan *Managed Isolation and Quarentine* (MIQ). ([Covid19.govt.nz](https://www.covid19.govt.nz), 2020: 1-3).

Managed Isolation and Quarentine (MIQ) merupakan dua fasilitas isolasi dan karantina yang disediakan pemerintah bagi para pengunjung yang akan masuk ke wilayah Selandia Baru. *Managed isolation* atau fasilitas isolasi terkelola merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi orang-orang yang saat kedatangannya memiliki hasil tes *Covid-19* negatif dan tidak melakukan kontak dengan orang yang positif. Sedangkan, *Quarentine* merupakan fasilitas karantina yang diperuntukkan bagi orang-orang yang terdiagnosis *Covid-19*, memiliki gejala, atau pernah melakukan kontak terhadap orang yang diduga positif. Mereka diwajibkan tinggal di fasilitas karantina ini selama minimal 14 hari.

Dibukanya kembali perbatasan *Trans-Tasman* pada 19 April 2021 menjadi penyebab terjadinya perlonjakan pemesanan pada fasilitas MIQ. Akibatnya muncul masalah terkait sistem pemesanan fasilitas MIQ. Dimana, ada sekitar 100 pengaduan resmi setiap minggunya terkait susahnya melakukan pemesanan kamar, hingga *website* pemesanan yang sering kali mengalami gangguan. Bahkan warga perlu memesan kamar MIQ sekitar 16 minggu sebelumnya agar bisa mendapatkan kamar sesuai tanggal keberangkatan ([Todd, 2021](#)).

Pemerintah Selandia Baru juga memiliki permasalahan dalam penyediaan ruangan kamar untuk penempatan isolasi dan karantina pengunjung. Pemerintah tidak bisa memenuhi penambahan kamar karena jumlah kamar yang tersedia dengan tingginya angka pemesanan kamar MIQ berbanding sangat jauh. Tercatat selama jangka waktu Januari 2021 s/d Juni 2021 kamar yang tersedia ialah sejumlah 3.402 kamar, dan total pengalokasian kamar pada periode tersebut ialah sebanyak 615.696 kamar dengan masa inap 14 hari dan diperuntukkan bagi para pengunjung, hingga awak pesawat ([Mason, 2022](#)).

Adanya permasalahan sistem akibat perlonjakan permintaan kamar pada fasilitas MIQ dan adanya keterbatasan pemerintah dalam menyediakan fasilitas. Mengakibatkan pemerintah justru terjebak oleh sistem persyaratan yang mereka buat. Oleh karena itu penangguhan *Trans-Tasman Bubble* tahap kedua pada 23 Juni 2021 terjadi agar pemerintah Selandia Baru memiliki waktu untuk memperbaiki sistem yang ada.

b. Program Vaksin Yang Belum Merata

World Health Organization (WHO) merekomendasikan kepada seluruh negara untuk memberikan vaksinasi *Covid-19* kepada warganya. Program vaksinasi *Covid-19* merupakan upaya pencegahan dari penyebaran wabah virus *Covid-19*. Tujuan melakukan vaksinasi ialah untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktifitas kesehariannya.

Pada 2 Juli 2021 WHO telah menetapkan kebijakan pendekatan berbasis resiko untuk perjalanan internasional dalam konteks *Covid-19*. Kebijakan ini merupakan terusan dari kebijakan yang sama yang telah dikeluarkan WHO sebelumnya pada Desember 2020. Kebijakan ini terdapat penambahan rekomendasi perjalanan internasional yaitu terkait program vaksinasi. Dimana, negara harus menambahkan persyaratan telah melakukan vaksinasi lengkap (*fully vaccinated*) bagi para pelaku perjalanan, dengan vaksin *Covid-19* yang telah terdaftar di WHO (WHO, 2021: 2-3).

Pada awal tahun 2021 sampai dengan pertengahan 2021, program vaksinasi belum dapat dilakukan secara merata di Selandia Baru. Tercatat total warga Selandia Baru yang telah melakukan vaksinasi pada periode 21 Februari 2021 sampai dengan 23 Juni 2021 (penanggulangan *Trans-Tasman Bubble* tahap ke-dua) hanya berjumlah 395.562 atau hanya sekitar 7,72% dari total populasi Selandia Baru yang mencapai 4,8 juta jiwa di tahun 2021 (ourworldindata.org, 2021).

Tabel 1. Jumlah Warga Selandia Baru Yang Telah Melakukan Vaksin Lengkap (Periode 21 Feb 21- 23 Jun 21)

No	Bulan	Tahun	Jumlah warga yang telah vaksin
1.	Februari	2021	29
2.	Maret	2021	15.583
3.	April	2021	74.038
4.	Mei	2021	229.444
5.	Juni	2021	395.562

Sumber: ourworldindata.org

Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan perjalanan internasional yang direkomendasikan oleh WHO yang mengharuskan sebagian besar warga negara telah melakukan vaksinasi untuk persyaratan pembukaan perjalanan internasional kembali. Sehingga menyebabkan penanggulangan pada kesepakatan *Trans-Tasman Bubble (Safe Travel Zone)* tahap kedua pada 23 Juni 2021.

c. Peluncuran Petisi Oleh Pihak Oposisi

Pasca penanggulangan *Trans-Tasman Bubble* tahap awal terjadi, pemerintah kedua negara memutuskan akan membuka kembali pada tahun 2021. kedua negara terus melangsungkan diskusi secara berkala untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk membuka kembali. Namun, pada 16 Maret 2021 partai oposisi Selandia Baru yaitu partai nasional meluncurkan sebuah petisi untuk mendesak pemerintah segera membuka perbatasan *Trans-Tasman* (Cooke, 2021).

Hingga tanggal 6 April 2021, petisi tersebut telah berhasil ditanda-tangani sebanyak 45.000 orang. Judith Collins selaku pemimpin dari partai nasional mengaku bangga dan menganggap bahwa partai mereka berhak mendapatkan “kredit terbesar” untuk terwujudnya pembukaan *Trans-Tasman Bubble* kembali. Pernyataan tersebut tidak berlangsung lama setelah adanya pengumuman pemerintah Selandia Baru di hari yang sama bahwa pada 19 April 2021 perbatasan *Trans-Tasman* akan dibuka kembali (Small, 2021).

Hal ini mengejutkan pemerintah serta warga Selandia Baru. Berbagai respon pun muncul menanggapi adanya petisi tersebut, ada yang memberikan dukungannya namun ada pula yang tidak setuju karena menganggap Selandia Baru belum siap untuk membuka kembali *Trans-Tasman Bubble*. Ditambah angka kasus *Covid-19* yang terus meningkat setiap harinya.

Setelah penangguhan pada tahap ke-dua terjadi pada 23 Juni 2021. Warga akhirnya banyak melayangkan protes terhadap kemunculan petisi dari partai nasional. Dikarenakan warga mengaggap bahwa keberadaan petisi tersebut cukup mempengaruhi pemerintah untuk membuka kembali perbatasan *Trans-Tasman*, padahal situasinya masih belum tepat, akhirnya menimbulkan hambatan-hambatan baru seperti munculnya masalah pada sistem MIQ, hingga program vaksin yang belum merata.

2. Australia

Hambatan faktor internal dari sisi Australia ialah mengenai belum meratanya program vaksinasi dan permasalahan persetujuan negara bagian Australia tentang perijinan kunjungan. Berikut adalah penjelasannya:

a. Program Vaksin Yang Belum Merata

Australia turut memberlakukan program vaksinasi *Covid-19* yang direkomendasikan oleh WHO. Pemerintah Australia mulai mendistribusikan vaksinasi *Covid-19* kepada warganya terhitung sejak 23 Februari 2021. Terdapat empat Jenis Vaksin yang disetujui oleh Australia untuk diberikan kepada warganya yaitu vaksin jenis *Moderna, AstraZeneca, Novavax dan Pfizer*. Namun, jumlah warga Australia yang telah melakukan vaksin terbilang masih cukup rendah di tahun 2021 khususnya pada saat perjalanan internasional *Trans-Tasman Bubble* kembali di buka pada 19 April 2021 (health.gov.au, 2021).

Berdasarkan data dari ourworldindata.org, Australia terhitung sejak pendistribusian vaksin pertama pada 23 Februari 2021 hingga terjadinya penutupan *Trans-Tasman Bubble* secara tiba-tiba pada 23 Juni 2021 hanya berhasil melakukan vaksinasi kepada warganya sekitar 1,24 juta orang atau hanya 4,82% dari total populasi Australia di tahun 2021 yang mencapai 21,24 juta jiwa (ourworldindata.org, 2021).

Tabel 2. Jumlah Warga Australia Yang Telah Melakukan Vaksin Lengkap (Periode 23 Feb 21- 23 Jun 21)

No	Bulan	Tahun	Jumlah warga yang telah vaksin
1.	Februari	2021	35
2.	Maret	2021	72.724
3.	April	2021	258.259
4.	Mei	2021	506.254
5.	Juni	2021	1.24 Juta

Sumber: ourworldindata.org

Dengan Jumlah warga yang telah melakukan vaksin tidak mampu mencapai kriteria persyaratan perjalanan internasional yang direkomendasikan oleh WHO, dimana mengharuskan sebagian besar warga negara telah melakukan vaksinasi untuk persyaratan pembukaan perjalanan internasional kembali. Sehingga menyebabkan penangguhan pada kesepakatan *Trans-Tasman Bubble (Safe Travel Zone)* tahap kedua pada 23 Juni 2021.

b. Persetujuan Negara Bagian

Pada 16 Oktober 2020 dimana dilaksanakannya pembukaan *Trans-Tasman Bubble* tahap awal, Australia dan Selandia Baru resmi melakukan perjalanan internasional satu arah (*one way*). Perjalanan internasional *one way* ini merupakan penerbangan uji coba dan

menargetkan penumpang Selandia Baru yang akan pergi ke Australia, dalam hal ini untuk melakukan kunjungan bisnis ataupun berwisata.

Berdasarkan kesepakatan pemerintah Australia dan Selandia Baru bahwa hanya terdapat dua wilayah negara bagian Australia yang dapat dikunjungi warga Selandia Baru yaitu, Northern Territory dan New South Wales. Hal ini dikarenakan, negara bagian lainnya masih belum memberikan ijin untuk menerima wisatawan asing ke wilayah mereka, Khususnya, wilayah Western Australia (Newstalkzb.co.nz, 2021).

Perdana menteri wilayah Western Australia Mark McGowan telah mengumumkan bahwa mereka bukan bagian dari *travel bubble* antara pemerintah federal Australia dengan Selandia Baru. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kasus *Covid-19* yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Dan berdasarkan konstitusi Australia bab V, tertulis bahwa setiap negara bagian Australia memiliki hak untuk mengatur wilayahnya masing-masing termasuk dalam mengatur siapa yang dapat masuk ke wilayah mereka, ataupun mengatur jalur transportasi untuk wilayah mereka (Australia.gov.au, 2022).

Namun, pasca penerbangan pertama dilakukan, telah terjadi sebuah pelanggaran dimana didapati sekitar 23 penumpang Selandia Baru mencoba menyelip ke Victoria agar dapat menuju destinasi tujuan mereka yaitu Perth yang merupakan wilayah Western Australia. Dimana Western Australia tidak masuk dalam zona kesepakatan kunjungan. Dengan segera para penumpang tersebut dikembalikan ke wilayah New South Wales dan melakukan karantina.

Pasca kejadian tersebut, Perdana menteri wilayah Western Australia Mark McGowan meminta kepada pemerintah federal Australia untuk membuat manajemen keamanan bandara lebih baik, serta memastikan kepada setiap pengunjung asal Selandia Baru yang datang melalui *Trans-Tasman Bubble* agar mengetahui wilayah-wilayah mana yang dibatasi. Akibat adanya masalah perijinan negara bagian inilah, pemerintah federal Australia dan Selandia Baru dianggap masih belum mampu membuat aturan yang tepat dan tidak dianggap mampu memantau jalannya *Trans-Tasman Bubble* dengan baik. Masalah perijinan negara bagian ini akhirnya menjadi salah satu faktor penanggulangan *Trans-Tasman Bubble* pada tahap awal di tahun 2020.

B. Faktor Eksternal

Penanggulangan pada kesepakatan *Trans-Tasman Bubble* yang terjadi sebanyak dua kali tidak hanya dipengaruhi oleh adanya faktor internal dari masing-masing negara, tetapi keberadaan faktor eksternal turut menjadi pengaruh terbesar kemunculan hambatan-hambatan lainnya serta berpengaruh besar dalam segala keputusan pemerintah pada kesepakatan ini. Hal ini terjadi karena terbentuknya kesepakatan ini juga di dasari oleh adanya faktor eksternal. Dalam hal ini, peningkatan kasus *Covid-19* secara fluktuasi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kesepakatan *Trans-Tasman Bubble*.

Baik pemerintah Australia dan Selandia Baru harus memantau kondisi perkembangan pandemi baik di negara mereka maupun secara global, untuk dapat menentukan keputusan yang tepat dalam pembuatan aturan-aturan perjalanan yang disepakati kedua negara selama pandemi.

Namun perkembangan kasus *Covid-19* yang melanda dunia terus mengalami ketidaktetapan kasus. Dalam hal ini, kasus dapat secara tiba-tiba meningkat drastis, namun dapat menurun secara tiba-tiba pula. Sedangkan, pemerintah kedua negara terus memantau naik dan turunnya kasus *Covid-19* sebagai tolak ukur bagi pelaksanaan dari kesepakatan *Trans-Tasman Bubble* tersebut.

Terjadinya peningkatan dan penurunan yang tidak menentu pada kasus *Covid-19* mampu memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan kesepakatan. Pengaruh terbesarnya ialah mampu menciptakan efek domino yang memicu munculnya faktor-faktor

penghambat lainnya. Pada akhirnya hambatan yang muncul mengakibatkan penangguhan pada kesepakatan *Trans-Tasman Bubble*. Selain itu, pemerintah kedua negara kesulitan menentukan waktu yang tepat untuk membuka kesepakatan dalam jangka waktu yang panjang, karena kerap kali dipengaruhi oleh kondisi perkembangan *Covid-19* secara global serta adanya peningkatan ataupun penurunan kasus *Covid-19* di dunia.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan hambatan dalam kesepakatan *Trans-Tasman Bubble (Safe Travel Zone)* Australia dan Selandia Baru, memberikan gambaran spesifik mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Australia dan Selandia Baru dalam membuka perjalanan internasional di masa pandemi *Covid-19* masih belum efektif. Hambatan yang muncul tidak lagi disebabkan oleh salah satu pihak saja, tetapi baik kedua negara sama-sama mempunyai permasalahan internal dan eksternal yang menyebabkan penangguhan pada kesepakatan *Trans-Tasman Bubble*.

Menurut K.J. Holsti, kerjasama internasional terjalin karena adanya nilai dan tujuan yang dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Namun, kenyataannya tidak semua pihak memberikan dukungan serta persetujuan untuk membuka *Trans-Tasman Bubble*. Beberapa negara bagian Australia cenderung terlalu ketat dalam membuat aturan dan tidak memberikan persetujuannya untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan, selain itu masih terdapat perbedaan pendapat dari masyarakat baik di kedua negara terkait apakah pemerintah sebaiknya membuka perbatasan atau tidak untuk kerjasama *Trans-Tasman Bubble* tersebut.

Selain itu, ketidaksiapan pemerintah Selandia Baru yang dapat terlihat dari sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti adanya kerusakan pada sistem MIQ serta kurangnya fasilitas. Hal ini memicu kesan di masyarakat bahwa pemerintah terlalu terburu-buru dalam persiapan serta dalam membuat aturan yang tepat pada pelaksanaan kesepakatan *Trans-Tasman Bubble*. Kedua negara memang memiliki kesamaan tujuan, dalam hal ini khususnya untuk membuka kembali perjalanan internasional di kedua negara sebagai upaya pemulihan ekonomi negara serta perjalanan dan wisata yang terdampak oleh *Covid-19*. Karena tidak siapnya pemerintah inilah pada akhirnya turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama.

Jika dicermati, maka dapat dipahami bahwa hambatan yang terjadi pada kesepakatan *Trans-Tasman Bubble* secara garis besar salah satunya terjadi karena Australia cenderung lebih ketat dalam aturannya khususnya pada negara bagiannya, dan kondisi Selandia Baru yang cukup susah untuk menyesuaikan. Sedangkan, pada Selandia Baru terkesan terlalu terburu-buru dalam membuat aturan, sehingga akhirnya memberikan dampak pada adanya sistem yang gagal. Selain itu pengaruh terbesar ialah adanya pandemi *Covid-19* yang memberikan efek domino sehingga memunculkan hambatan lainnya dalam kesepakatan *Trans-Tasman Bubble*.

Sjamsumar Dam dan Rusandi memaparkan bahwa dalam kerjasama internasional terdapat salah satu syarat utama yang wajib dilakukan agar kerjasama yang diharapkan dapat tercapai yakni, adanya keputusan bersama-sama dalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam kerjasama. Dimana kesepakatan ataupun kerjasama tersebut dapat dilakukan melalui konsultasi serta komunikasi yang berkesinambungan.

Australia dan Selandia Baru dapat dikatakan memang memiliki komunikasi yang cukup baik dan intens dalam upaya kedua negara mengatasi persoalan yang muncul dalam kesepakatan TTB. Hal ini dapat terlihat dari kedua negara yang sering mengadakan pertemuan khususnya pasca *Trans-Tasman Bubble* tahap pertama mengalami penangguhan di tahun 2020. Pertemuan terus diadakan di akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Namun, komunikasi dan konsultasi yang berjalan dengan baik tersebut tidak memiliki komitmen bersama dalam menciptakan solusi untuk meminimalisir adanya penangguhan kembali pada kesepakatan. Hingga ketika muncul hambatan baru pada pelaksanaan *Trans-*

Tasman Bubble tahap kedua, tidak didapati solusi pemecahan masalah selain daripada melakukan penangguhan kembali.

Kesimpulan

Dalam mengatasi permasalahan terjadinya penurunan pendapatan perekonomian negara yang terdampak pandemi *Covid-19* khususnya pada sektor pariwisata, industri penerbangan, bisnis dan perdagangan di negara Australia dan Selandia Baru, pemerintah kedua negara melakukan kesepakatan bersama yang disebut *Trans-Tasman Bubble (Safe Travel Zone)*. Kesepakatan ini mengatur tentang perjalanan bagi warga kedua negara baik itu untuk wisata, bisnis maupun perdagangan selama pandemi. dimana pengaturan perjalanan yang berlaku telah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berstandar WHO.

Namun, dalam pelaksanaannya, kesepakatan ini mengalami hambatan sehingga terjadi penangguhan sebanyak dua kali yaitu ditahun 2020 dan 2021. Adanya faktor internal dan eksternal telah menjadi hambatan pada pelaksanaannya, yaitu dimana faktor internal merupakan hambatan akibat permasalahan didalam internal negara yang meliputi, adanya permasalahan pada *Managed isolation and Quarantine (MIQ)*, belum meratanya program vaksinasi, munculnya petisi dari partai oposisi, hingga permasalahan persetujuan negara bagian. Untuk faktor eksternal, yaitu karena adanya kasus *Covid-19* yang terjadi secara fluktuasi sehingga mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan, serta menimbulkan efek domino yaitu munculnya hambatan-hambatan lainnya dikarenakan faktor eksternal tersebut.

Daftar Referensi

Buku, Jurnal dan Dokumen

- Muhammad, Pasha Aulia dan Sudharmono Saputra. 2020. Indonesia terkucil? *Safe travel corridor* dan ancaman deglobalisasi pasca pandemi COVID-19. White Paper PPI.
- Dam, Sjamsumar dan Riswandi. 1995. Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Coplin, William D. 1971. *International Politics: A Theoretical Overview*. Chicago Markham Publishing Company.
- Draft Cabinet for Trans Tasman COVID Safe Travel Zone. 2020. CAB-20-MIN--0532.
- Herbert, Anne L. 1996. *Cooperation in International Relations: A Comparison of Keohane, Haas, and Franck*. Vol. 14:222.
- Holsti, K.J. 1988. Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II. Terjemahan M.Tahrir Azhari. Jakarta:Erlangga.
- Mason, Sean. 2021. *Ministry of Business, Innovation and Employment. Total Number of MIQ room allocated since 1 January 2021 to June 2021*.
- Perwita, Anak Agung Bayu dan Yanyan Mochamad Yadi. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- World Health Organization. 2021. *Policy Considerations for Implementing a Risk-based approach to International Travel in Context of COVID-19*.
- Zulkifli. 2012. Kerjasama internasional sebagai solusi pengelolaan kawasan perbatasan negara (studi kasus indonesia).

Internet

Australian Government Department of Health. tersedia di <https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines>

Australia Government. tersedia di <https://www.australia.gov.au/states>

Chen, Jackie. 2020. Tersedia di <https://www.businesstraveller.com/businesstravel/2020/03/20/australia-new-zealand-close-borders-to-foreign-nationals-due-to-coronavirus/>

Forst, Natasha. 2021. tersedia di <https://www.nytimes.com/2021/07/23/world/australia/australia-new-zealand-covid-travel.html>

Modernisation committee. 2016. Tersedia di https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.54/2016/Organisational_barriers_to_international_cooperation_1st_draft.pdf&ved=2ahUKEwjl0eOpPr1AhWQRmwGHW3VCv4QFnoECAoQAQAg&usg=AOvVaw1bxJRGcmzHVOBwve_VIJOs

Small, Zane. 2021. Newshub NZ. 2021. tersedia di <https://www.newshub.co.nz/home/politics/2021/04/trans-tasman-travel-bubble-judith-collins-attributes-biggest-credit-to-national-s-online-petition.html>

NewstalkZB. 2021. tersedia di <https://www.newstalkzb.co.nz/on-air/heather-du-plessis-allan-drive/audio/murray-olds-why-western-australia-is-not-part-of-the-travel-bubble-yet/>

Our World in Data. tersedia di ourworldindata.org

Todd, Katie. 2021. RNZ NEWS. *MIQ receiving about 100 complaints each week over booking system.* tersedia di <https://www.rnz.co.nz/news/national/438854/miq-receiving-about-100-complaints-each-week-over-booking-system>

Cooke, Henry. 2021. Stuff NZ. tersedia di <https://i.stuff.co.nz/national/politics/300253765/national-launches-petition-for-trans-tasman-bubble-to-be-opened-immediately?s=03>

The Guardian.com. 2020. tersedia di <https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/trans-tasman-travel-bubble-to-allow-flights-as-soon-as-lockdowns-ease-morrison-and-ardern-agree>